



PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021-2024

(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2021-2024)

Bintang Dwi Kristiastanto, Shiddiq Nur Rahardjo¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study examines the effect of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), Land and Building Acquisition Duty (BPHTB), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Poverty Rate on the Human Development Index (HDI). The study was conducted across all regencies and municipalities in Central Java Province for the 2021–2024 period, motivated by persistent HDI disparities across districts and the limited studies simultaneously incorporating local tax, fiscal transfer, and poverty variables.

This study employs a quantitative approach using multiple linear regression on 140 panel data observations obtained through saturated sampling of 35 regencies and municipalities. Data were sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Fiscal variables were transformed into natural logarithm form, and hypotheses were tested through t-test, F-test, and Adjusted R^2 , preceded by classical assumption tests.

The F-test confirms that all variables simultaneously and significantly affect HDI, with an F value of 60.417 and a significance level of 0.000, while the Adjusted R^2 of 0.681 indicates that the independent variables explain 68.1% of HDI variation. Partially, BPHTB has a positive and significant effect on HDI, as does DAU. In contrast, DAK has a negative and significant effect on HDI, suggesting that increases in DAK have not directly improved human development quality in the short run. Meanwhile, PBB-P2 and Poverty Rate show no significant effect on HDI.

Keywords: *Human Development Index, PBB-P2, BPHTB, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Poverty Rate, Fiscal Decentralization.*

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Berbeda dengan indikator ekonomi yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan pendapatan, IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian pembangunan manusia serta menjadi dasar dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan (Sutrisna & Dewi, 2024; Yulianti & Qomariah, 2025).

¹ Corresponding author

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 72,16 pada tahun 2021 menjadi 73,88 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Jawa Tengah sehingga diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi IPM. Dalam perspektif Teori Desentralisasi Fiskal, peningkatan kapasitas fiskal daerah memungkinkan pemerintah daerah menyediakan layanan publik yang lebih baik sehingga dapat mendorong pembangunan manusia. Salah satu sumber kapasitas fiskal daerah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Peningkatan penerimaan kedua jenis pajak tersebut dapat memperluas kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjadi komponen pembentuk IPM (Hasibuan et al., 2023; Azizah, 2024). Selain itu, BPHTB juga mencerminkan aktivitas ekonomi dan perkembangan sektor properti yang dapat meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Sari, 2023).

Selain pajak daerah, transfer fiskal dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) turut berperan dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. DAU bertujuan mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, sedangkan DAK dialokasikan untuk mendanai program prioritas nasional, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan DAU dan DAK diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dan pada akhirnya meningkatkan IPM (Kurniasari, 2021).

Di sisi lain, tingkat kemiskinan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan manusia. Tingginya tingkat kemiskinan membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya sehingga berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam IPM (Syofya, 2018). Oleh karena itu, hubungan antara kapasitas fiskal daerah, transfer fiskal, dan tingkat kemiskinan menjadi penting untuk dikaji dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap IPM (Putri & Ribawati, 2025; Sari, 2023), sementara tingkat kemiskinan cenderung berpengaruh negatif terhadap IPM (Simanjuntak, 2024; Safitri et al., 2024). Penelitian lain menemukan bahwa DAU berpengaruh langsung terhadap IPM, sedangkan DAK memberikan pengaruh tidak langsung melalui peningkatan belanja pembangunan (Kurniasari, 2021). Namun demikian, hasil penelitian terkait pengaruh kemiskinan dan transfer fiskal terhadap IPM masih menunjukkan inkonsistensi sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut.

Penelitian ini berangkat dari studi Putri dan Ribawati (2025) yang menganalisis pengaruh pajak daerah, belanja bantuan sosial, dan tingkat kemiskinan terhadap IPM. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memecah variabel pajak daerah menjadi dua komponen spesifik, yaitu PBB-P2 dan BPHTB, serta menambahkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai representasi transfer fiskal pemerintah pusat. Selain itu, penelitian ini menggunakan periode 2021–2024 yang mencerminkan fase pemulihan pascapandemi COVID-19. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PBB-P2, BPHTB, DAU, DAK, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Desentralisasi Fiskal

Landasan teori utama penelitian ini adalah Teori Desentralisasi Fiskal yang dibangun oleh tiga tokoh utama: Musgrave (1959), Tiebout (1956), dan Oates (1972). Musgrave (1959) dalam *The Theory of Public Finance* meletakkan kerangka dasar fungsi fiskal pemerintah yang terdiri atas tiga peran pokok: (1) fungsi alokasi berupa penyediaan barang dan jasa publik secara efisien; (2) fungsi distribusi yaitu pemerataan pendapatan dan kesejahteraan antargolongan dan antardaerah; serta (3) fungsi stabilisasi untuk menjaga kestabilan ekonomi makro. Musgrave (1959) berargumen bahwa

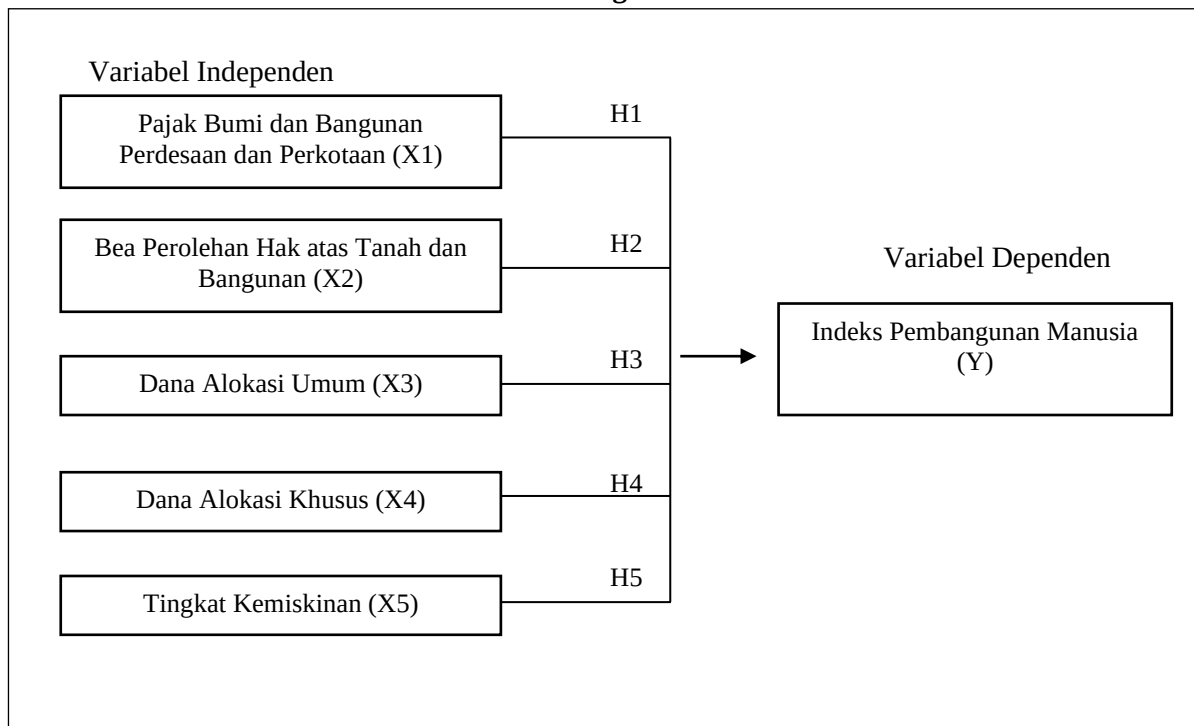
fungsi alokasi paling efisien dijalankan pemerintah daerah karena mereka memiliki informasi lebih baik tentang kebutuhan masyarakat lokal. Tiebout (1956) dalam "*A Pure Theory of Local Expenditures*" mengembangkan model kompetisi antardaerah secara formal, menyatakan bahwa penduduk akan "memilih dengan kaki" (*vote with their feet*) menuju daerah dengan paket pajak-layanan publik yang paling sesuai preferensi mereka. Oates (1972) dalam *Fiscal Federalism* menyempurnakan kedua pemikiran tersebut menjadi *Decentralization Theorem* yang menjadi rujukan paling berpengaruh: penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah akan menghasilkan tingkat kesejahteraan yang sama atau lebih tinggi dibandingkan sentralisasi, karena daerah mampu menyesuaikan output layanan sesuai kebutuhan lokalnya (Oates, 1972, hlm. 54).

Dalam konteks penelitian ini, PBB-P2 dan BPHTB merupakan wujud nyata fungsi alokasi Musgrave (1959)—bukti kongkretnya adalah pengalihan kewenangan pemungutan kedua pajak tersebut dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota melalui UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 1 Tahun 2022. Sementara DAU dan DAK merupakan instrumen fungsi distribusi yang mentransfer dana dari pusat ke daerah guna pemeratakan kapasitas fiskal. Tingkat kemiskinan berposisi sebagai variabel hasil (*outcome*) dari efektivitas fungsi distribusi: ketika pengelolaan fiskal daerah berhasil menurunkan kemiskinan, akses masyarakat terhadap layanan dasar meluas dan IPM meningkat (Oates, 1972).

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada Teori Desentralisasi Fiskal serta penelitian Putri dan Ribawati (2025) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan, sedangkan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Berdasarkan teori tersebut, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penerimaan pajak dan transfer fiskal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan manusia. Penelitian ini memodifikasi penelitian Putri dan Ribawati (2025) dengan memfokuskan variabel pajak daerah menjadi PBB-P2 dan BPHTB, serta menambahkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai representasi transfer fiskal pemerintah pusat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PBB-P2, BPHTB, DAU, DAK, dan tingkat kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah peneliti, 2026



Perumusan Hipotesis

Pengaruh PBB-P2 terhadap IPM

PBB-P2 merupakan salah satu komponen pajak daerah yang berpotensi memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam kerangka teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972), semakin besar kemampuan daerah menghimpun pajak, semakin besar peluang peningkatan kualitas pembangunan manusia. Penelitian Sari (2023) dan Putri & Ribawati (2025) menemukan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

H1: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengaruh BPHTB terhadap IPM

BPHTB sebagai sumber penerimaan daerah memiliki peran strategis dalam mendanai program pembangunan, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi dimensi utama IPM. Sejalan dengan fungsi alokasi dalam teori Musgrave (1959), penerimaan BPHTB yang dikelola pemerintah daerah dapat diarahkan untuk membiayai komponen-komponen pembentuk IPM. Penelitian Putria & Rahardjo (2023) menunjukkan BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

H2: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengaruh DAU terhadap IPM

DAU merupakan instrumen transfer fiskal yang bertujuan mengurangi ketimpangan kapasitas finansial antardaerah, sehingga pemerintah daerah mampu membiayai layanan publik dasar yang berdampak pada peningkatan IPM (Oates, 1972). Penelitian Kurniasari (2021) menemukan DAU berdampak langsung terhadap IPM di kabupaten/kota Jawa Timur, mengonfirmasi bahwa transfer fiskal dari pusat memiliki dampak nyata terhadap kualitas pembangunan manusia.

H3: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengaruh DAK terhadap IPM

DAK bersifat *specific grant* yang penggunaannya diarahkan pada bidang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sehingga secara teoritis memiliki jalur pengaruh yang lebih langsung terhadap komponen IPM. Musgrave (1959) menyatakan bahwa transfer yang diarahkan secara spesifik pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat mendorong peningkatan kualitas SDM yang tercermin dalam capaian IPM.

H4: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap IPM

Tingkat kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan dasar berupa kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang merupakan dimensi utama IPM. Secara teoritis, semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah akses masyarakat terhadap layanan dasar sehingga berpotensi menurunkan IPM (Alam, 2024). Hasil penelitian Simanjuntak (2024) dan Asyifa & Chandriyanti (2025) mengonfirmasi kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.

H5: Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Menurut Sekaran dan Bougie (2016), populasi merupakan keseluruhan unsur yang berupa individu, kelompok, objek, ataupun peristiwa tertentu yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2021–2024 sehingga diperoleh total 35 kabupaten/kota. Penelitian menggunakan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (djpk.kemenkeu.go.id) untuk memperoleh data IPM, realisasi penerimaan fiskal, dan tingkat kemiskinan selama periode penelitian. Dalam penentuan sampel, digunakan metode *sampling jenuh*, yaitu merupakan metode penentuan sampel penelitian yang menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel karena jumlah populasi relatif kecil. Penelitian ini menetapkan seluruh 35 kabupaten/kota sebagai sampel dengan total 140 observasi (35 kabupaten/kota $\times$ 4 tahun).

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel independen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan tingkat kemiskinan, serta variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya.

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Independen		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM	Nilai IPM tahunan yang dirilis BPS per kabupaten/kota
Variabel Dependen		
PBB-P2	Ln_PBB_P2	Ln (realisasi penerimaan PBB-P2)
BPHTB	Ln_BPHTB	Ln (realisasi penerimaan BPHTB)
DAU	Ln_DAU	Ln (realisasi penerimaan DAU)
DAK	Ln_DAK	Ln (realisasi penerimaan DAK fisik + non-fisik)
Tingkat Kemiskinan		Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap IPM. Model regresi yang digunakan adalah:

$$IPM = \alpha + \beta_1 Ln_PBB_P2 + \beta_2 Ln_BPHTB + \beta_3 Ln_DAU + \beta_4 Ln_DAK + \beta_5 TK + \varepsilon$$

Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (Tolerance dan VIF), uji heteroskedastisitas (Uji Glejser), dan uji autokorelasi (Durbin-Watson) untuk memastikan model regresi menghasilkan estimasi yang valid dan tidak bias.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian menggunakan data sekunder dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2024, menghasilkan 140 observasi. Seluruh observasi memenuhi kebutuhan penelitian dan digunakan dalam proses analisis statistik.

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian menggunakan data sekunder dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2024, menghasilkan 140 observasi. Seluruh observasi memenuhi kebutuhan penelitian dan digunakan dalam proses analisis statistik.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

No.	Variabel	N	Mean	Std. Deviasi	Min	Maks
1.	IPM	140	73,957	4,642	66.64	85.72
2.	Ln_PBB_P2	140	24,332	0,755	22.59	27.17
3.	Ln_BPHTB	140	24,233	0,835	22.40	27.28
4.	Ln_DAU	140	27,523	0,304	26.74	28.01
5.	Ln_DAK	140	26,592	0,466	25.16	27.35
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	140	10,625	3,327	4.03	17.83

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

IPM menunjukkan nilai rata-rata 73,957 dengan standar deviasi 4,642, mengindikasikan tingkat pembangunan manusia yang cukup baik dengan variasi antarwilayah yang moderat. Tingkat kemiskinan memiliki standar deviasi terbesar (3,327), mencerminkan disparitas sosial-ekonomi yang masih signifikan antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3
Uji Asumsi Klasik

Uji	Nilai Statistik	Hasil
Normalitas (K-S) – Asymp. Sig.	0,200	Normal
Multikolinearitas – VIF tertinggi (DAU)	3,42	Normal
Heteroskedastisitas (Glejser) – Sig.	0.014	Normal
Autokorelasi (Durbin-Watson)	1,907	Normal

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menghasilkan nilai *Asymp. Sig.* (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$, menandakan residual model berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF setiap variabel berada di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1, sehingga model bebas dari multikolinearitas. Uji autokorelasi dengan Durbin-Watson menghasilkan nilai 1,907 yang berada di daerah tidak terjadi autokorelasi.

Uji Normalitas

Tabel 4 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai *asympt. sig.* tiap variabel memiliki nilai < 0.05 sehingga menunjukkan data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

<i>Unstandardized Residual</i>		
N		140
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.00000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.57348
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.039
	<i>Positive</i>	.039
	<i>Negative</i>	-.034
<i>Test Statistic</i>		.039
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^c

Sumber: Data sekunder yang diolah menggunakan IBM SPSS 25, 2023



Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,681 mengindikasikan bahwa variabel PBB-P2, BPHTB, DAU, DAK, dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama mampu menjelaskan 68,1% variasi IPM. Sementara sisa 31,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik.

Tabel 4.5
Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the estimate</i>
1	.832	.693	.681	2.62101

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regression	2.075,239	5	415,048	60,417	0,000
Residual	920,540	134	6,870		
Total	2.995,778	139			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026.

Nilai F hitung sebesar 60,417 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Parsial (Uji t)

<i>Variabel</i>	<i>Koefisien (β)</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Keputusan</i>
Ln_PBB_P2	0,794	0,531	0,129	1,496	0,137	Ditolak
Ln_BPHTB	2,357	0,466	0,424	5,058	0,000	Diterima
Ln_DAU	8,427	2,268	0,552	3,716	0,000	Diterima
Ln_DAK	-11,604	1,369	-1,165	-8,476	0,000	Ditolak
Tingkat Kemiskinan	-0,108	0,107	-0,077	-1,014	0,312	Ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Pembahasan

Pengaruh PBB-P2 terhadap IPM (H1 Ditolak). PBB-P2 tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM ($\beta = 0,794$; sig. = 0,137). Meskipun arah koefisien positif sesuai ekspektasi teoritis, dampaknya belum terbukti secara statistik. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh masih relatif kecilnya kontribusi PBB-P2 dibandingkan sumber pendapatan daerah lain, serta pengalokasian penerimaan yang belum sepenuhnya difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi komponen pembentuk IPM (Azizah, 2024). Temuan ini sejalan dengan Hasibuan dkk. (2023) yang menemukan bahwa dampak PBB-P2 terhadap IPM masih bergantung pada efektivitas pengelolaan fiskal daerah.

Pengaruh BPHTB terhadap IPM (H2 Diterima). BPHTB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM ($\beta = 2,357$; sig. = 0,000). Tingginya penerimaan BPHTB mencerminkan adanya kenaikan aktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya memperluas kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik (Sari, 2023). Daerah dengan penerimaan BPHTB tinggi cenderung memiliki akses layanan publik yang lebih memadai sehingga capaian IPM-nya lebih baik. Temuan ini konsisten dengan teori desentralisasi fiskal bahwa peningkatan kapasitas pendapatan daerah mendorong efektivitas pembangunan manusia (Musgrave, 1959).

Pengaruh DAU terhadap IPM (H3 Diterima). DAU berpengaruh positif signifikan terhadap IPM ($\beta = 8,427$; sig. = 0,000). DAU sebagai transfer fiskal dari pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran umum, termasuk belanja di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi dimensi utama pembentuk IPM. Peran DAU sangat strategis bagi daerah dengan kapasitas PAD terbatas karena memungkinkan pemerataan layanan publik antarwilayah (Kurniasari, 2021). Temuan ini mendukung prinsip fungsi distribusi Musgrave (1959) bahwa transfer fiskal yang efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh DAK terhadap IPM (H4 Ditolak, arah negatif). DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM ($\beta = -11,604$; sig. = 0,000), berlawanan arah dari hipotesis. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi DAK belum mampu mendorong kualitas pembangunan manusia secara langsung. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tiga faktor: pertama, DAK lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik dan infrastruktur jangka panjang sehingga dampaknya terhadap komponen IPM tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek; kedua, adanya ketidakefisienan penyerapan anggaran dan keterlambatan pelaksanaan program di tingkat daerah; ketiga, kecenderungan DAK lebih besar dialokasikan kepada daerah dengan tingkat pembangunan yang masih rendah, sehingga besarnya DAK justru mencerminkan tingginya kebutuhan dasar daerah tersebut (Kurniasari, 2021). Temuan ini konsisten dengan anomali yang dilaporkan oleh Utomo dkk. (2025) bahwa tidak semua transfer fiskal bertujuan khusus secara otomatis meningkatkan IPM dalam jangka pendek.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap IPM (H5 Ditolak). Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM ($\beta = -0,108$; sig. = 0,312). Meskipun arah koefisien negatif sesuai ekspektasi teoritis, dampaknya belum terbukti signifikan secara statistik. Kondisi ini dapat dipicu oleh adanya program bantuan sosial, subsidi pemerintah, dan kebijakan pembangunan daerah yang mampu menjaga kualitas hidup masyarakat dan menopang capaian IPM meskipun tingkat kemiskinan masih relatif tinggi (Engelica, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi kemiskinan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan fiskal dan program pembangunan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh PBB-P2, BPHTB, DAU, DAK, dan tingkat kemiskinan terhadap IPM di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2024. Total observasi yang digunakan sebanyak 140 data. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. PBB-P2 tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, kemungkinan karena kontribusinya relatif kecil dibandingkan sumber pendapatan lain dan pengalokasiannya belum sepenuhnya diarahkan pada sektor pembentuk IPM.
2. BPHTB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, mencerminkan bahwa dinamika aktivitas ekonomi dan sektor properti yang tinggi memperluas kapasitas fiskal daerah untuk membiayai layanan publik berkualitas.
3. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, menegaskan peran strategis transfer fiskal pusat-daerah dalam membiayai belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
4. DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM—temuan yang kontradiktif ini menunjukkan bahwa fokus DAK pada pembangunan fisik jangka panjang dan persoalan efektivitas penyerapan menyebabkan dampaknya terhadap IPM tidak dapat dirasakan secara langsung dalam jangka pendek.
5. Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa program bantuan sosial dan kebijakan pembangunan mampu menopang kualitas hidup masyarakat terlepas dari tingginya tingkat kemiskinan.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Model hanya mencakup lima variabel independen sehingga 31,9% variasi IPM dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
2. Analisis belum mempertimbangkan variabel belanja daerah sebagai mekanisme transmisi antara penerimaan fiskal dan IPM.
3. Periode penelitian empat tahun masih tergolong singkat untuk mengamati dampak jangka panjang dari investasi infrastruktur yang dibiayai DAK.

Saran

Dengan mempertimbangkan hasil temuan penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini penelitian selanjutnya disarankan:

1. Menambahkan variabel belanja modal dan belanja sosial sebagai variabel intervening untuk menelusuri mekanisme transmisi fiskal terhadap IPM.
2. Memperluas periode penelitian guna menangkap efek jangka panjang DAK terhadap IPM.
3. Menggunakan pendekatan regresi data panel dengan *fixed effect* atau *random effect model* untuk mengendalikan heterogenitas antardaerah yang tidak teramati.

REFERENSI

- Abiyyi, & Muhammad Agung. (2024). Analisis Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 7(2), 35–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jdep.v7i2.376>
- Alam, F. S. B. A. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Asing Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 4(1), 53–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v4i1.456>
- Alfrifda Karampuan, Rachmad Budi Suharto, & Diana Lestari. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 66–76. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.610>
- Anggraini, L. W. ; P. D. N. ; M. M. H. (2025). Pengaruh Belanja, Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JILAK)*, 2(3), 49–56. <https://doi.org/10.69714/fyh96763>
- Anggy Dwi Safitri, Elsa Putri Vrasetya, & Misfi Laili Rohmi. (2024). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak (JBEP)*. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.109>
- Anisa Selly Nugrahini, Indah Syahira Siagian, Jessica Artha Febriana, Kayla Anindya Tiandoko, & Setya Wati. (2025). Analisis Kontribusi dan Optimalisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11, 28–36. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11085>
- Arrohman, M. I. R. (2025). Analisis Pungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dampaknya terhadap Harga Jual Perumahan. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(6). <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/triwikrama/article/view/7191>
- Athira, & Lukose. (2023). Objek Pajak dalam PBB-P2. *Automatically Extracted from Thesis*.
- Ayu Setiyani, F. R. S. F. R. S. A. S. (2024). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan*.
- Engelica, D. C. U. (2025). Analyzing the Impact of Poverty, Unemployment and Education on HDI in Sragen Regency. *Analyzing the Impact of Poverty, Unemployment and Education on HDI in Sragen Regency*.
- Fitriana, N., & Tanuwijaya, H. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Indonesia Accounting Research Journal (IARJ)*, Politeknik Negeri Bandung, 1. <https://jurnal.polban.ac.id/iarj>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.



- Indiati, P. S. T. M., & Sari, O. R. P. (2024). Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 734–743. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14436683>
- Jelin Rachel Stephoney Saragih, Jesica Septy Leony Simanungkalit, & Mirna Salifah Siregar. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, Belanja Pemerintah dan IPM Terhadap PDRB di Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1).
- Kurniasari, R. K. K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3), 1–18. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira>
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Putri, R. Z., & Ribawati, E. (2025). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Belanja Bantuan Sosial, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2020–2024. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.59827/jie.v4i3.363>
- Putria, A. R. R., & Rahardjo, S. N. (2023). Local Economic Growth: Does Local Original Income Mediate its Relationship with PBB-P2 and BPHTB? *Diponegoro Journal of Accounting*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rika Nur Asyifa, & Ika Chandriyanti. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 8(2), 386–397. <https://doi.org/10.20527/jiep.v8i2.597>
- Salwa, & others. (2023). Transformasi Logaritma dalam Analisis Data Fiskal Daerah. *Journal/Source to Be Verified*.
- Sari, R. A. R. M. R. (2023). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2017–2021). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 5983–5994. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.3136>
- Sholekhah. (2018). Konsep Dasar Pajak Bumi dan Bangunan. *Automatically Extracted from Thesis*.
- Simanjuntak, B. F. T. ; Z. M., Harahap, J., Lubis, R. J., Pardede, T., Hutapea, U., & Silalahi, M. M. (2024). Pengaruh Angka Harapan Hidup dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(3). <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/516>
- Soenarko, & Hendrati. (2023). Konsep Human Development Index dalam Pembangunan. *Automatically Extracted from Thesis*.



- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Automatically extracted from thesis* (3rd ed.). Alfabeta.
- Sutrisna, & Dewi. (2024). Peran Indeks Pembangunan Manusia dalam Evaluasi Pembangunan. *Automatically Extracted from Thesis*.
- Syofya, H. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15, 177–185. <https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1153>
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424. <https://doi.org/10.1086/257839>
- Utomo, H. S., Ashar, N. Y., Fata, H. K., & Kurniawati, M. (2025). The Effect of Economic Growth, per Capita Expenditure, and Poverty Levels on the Human Development Index in Central Java Province. *International Journal of Research and Review*, 12(10), 329–335. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20251033>
- Yuliansyah. (2021). IPM sebagai Instrumen Evaluasi Pembangunan Nasional. *Automatically Extracted from Thesis*.